

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses kearah yang lebih baik sesuai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai kebutuhan yang mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi - institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.¹ Dengan timbulnya krisis ekonomi yang melanda negara kita, maka hal ini dapat berdampak pada tingginya jumlah pengangguran, bertambahnya jumlah penduduk miskin dan turunnya tingkat kesehatan serta pendidikan masyarakat.

Dengan kondisi semacam ini maka pemerintah melaksanakan program pembangunan diberbagai wilayah, dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat desa. Sasaran pembangunan terutama kepada mereka yang dikategorikan miskin. Program pembangunan oleh pemerintah secara langsung dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – mandiri Perdesaan) mulai tahun 2007 untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptakan lapangan kerja. Melalui PNPM – Mandiri Perdesaan

¹ Todaro, *Ekonomi Pembangunan di Dunia ketiga*, Erlangga, Jakarta. 1997, hal 20

dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.² Sehingga program PNPM-Mandiri yang di upayakan oleh pemerintah dapat meningkatkan ekonomi pembangunan di daerah yang masih tergolong menengah kebawah.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumatera Barat, selama ini program PNPM Pedesaan yang telah berlangsung di Sumatera Barat, mampu menurunkan angka kemiskinan sejak tahun 2007, dengan total anggaran Rp 1,8 triliun dapat mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan mendorong kegiatan perekonomian.³ Sehingga fasilitator PNPM perlu di berdayakan kembali dengan menyerap aspirasi masyarakat untuk terjun kepada kegiatan yang nyata.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Enam Lingsung, adalah sebuah lembaga dibawah naungan Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN)

² Wiwik Surini, *Pengaruh pemberian dana bergulir (PNPM-Mandiri) Terhadap pendapatan Keluarga di desa Weton*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponegoro;2015, hal 1

³ Umi NurFadhilah, *Pemprov Sumbar Berdayakan Fasilitas PNPM Pedesaan, 2015*,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/25/nlrazr-pemprov-sumbar-berdayakan-fasilitator-pnpm-pedesaan>

Kecamatan Enam Lingsung, berdiri sejak mulai masuknya PNPM. Secara khusus UPK Enam Lingsung memang disiapkan menjawab keluhan permodalan RTM yang ada dikorong, ditengah sulitnya mendapat pendanaan usaha kecil dengan persyaratan dan jasa yang ringan, “dikatakan jasa karena SPP PNPM tidak mengenal bunga” dan memberi pengertian kepada masyarakat di tingkat paling bawah, kalau pinjaman SPP PNPM itu benar-benar program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dengan memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dengan membentuk kelompok-kelompok usaha ekonomi.⁴ UPK Enam Lingsung sudah mempunyai modal sebesar Rp 1,4 miliar dana tersebut berasal dari dana alokasi anggaran BLU yang turunkan ke Kecamatan sebesar 25 persen pertahunnya, dari dana tersebut UPK enam lingsung sudah melakukan Perguliran SPP sebanyak lima kali peguliran sebesar Rp 2,7 miliar` dengan 48 kelompok SPP aktif, rata-rata peguliran yang dilakukan sebesar Rp 540 juta dengan jumlah pemanfaat dari rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 480 orang, tersebar di 48 kelompok di korong yang ada di kecamatan Enam Lingsung, namun persoalan dan permasalahan, seperti pengembalian angsuran yang macet maupaun itikad yang kurang baik dari beberapa pengurus SPP, penyelesaiannya belum begitu Efektif, disebabkan paradigma yang sudah melekat dimasyarakat.

⁴ Ikram Dasrul, *UPK Kecamatan Enam Lingsung, 2018*,
<http://palitopiaman.blogspot.co.id/2012/03/27-m-dana-spp-sudah-digulirkan-upk.html>

Untuk itu dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan secara terarah, terpadu, efektif dan efisien untuk dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi dan misi pembangunan serta dapat dinikmati secara lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Keberhasilan pendapatan masyarakat sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat itu sendiri, sikap mental, semangat, ketaatan serta disiplin dan kepribadian aparatur pemerintah Kecamatan dalam mewujudkan pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa. Sehubungan dengan hal tersebut maka dari permasalahan ini penulis mengangkat judul **“Pengaruh Kredit PNPM-MP Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

Secara khusus UPK Enam Lingsung memang disiapkan menjawab keluhan permodalan RTM yang ada dikorong, ditengah sulitnya mendapat pendanaan usaha kecil dengan persyaratan dan jasa yang ringan, karena tidak dikenakan sistem pengambilan bunga dan simpan pinjam di berikan kepada masyarakat miskin guna membantu permasalahan ekonomi masyarakat yang tergolong dalam ekonomi menengah kebawah, namun persoalan seperti macetnya pengembalian angsuran pinjaman dari masyarakat membuat proses kegiatan PNPM tersebut jadi kurang efektif. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Pengaruh PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman?
2. Jenis usaha apakah yang mampu berkembang cepat setelah diberi bantuan kredit PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat Kecamatan Enam Lingsung yang menerima bantuan pinjaman kredit program PNPM Mandiri Pedesaan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam penerima bantuan pinjaman yaitu Pertanian, Peternakan, dan Perdagangan.

D. Tujuan Penelitian

Berbagai literatur menjelaskan bahwa PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program PNPM-Mandiri yang di upayakan oleh pemerintah dapat meningkatkan ekonomi pembangunan di daerah yang masih tergolong menengah Kebawah. Oleh karenanya, studi ini mencoba untuk :

1. Mengetahui Pengaruh PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mengetahui perkembangan jenis usaha yang dapat berkembang setelah pemberian PNPM di Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sjana Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri (Uin) Imam Bonjol Padang.
2. Untuk mengkaji pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Pendapatan Masyarakat
3. Dapat digunakan sebagai bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya

